RENJA 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

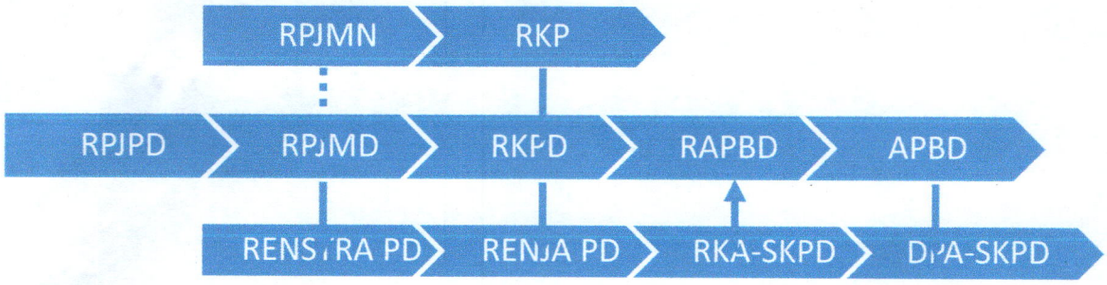
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Restra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya Pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Restra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
32. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
38. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

39. Peraturan Bupati Ngajuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
40. Peraturan Bupati Nganjuk No 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. 1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan indicator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke 1 (pertama) periode tahun 2025 ; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 ;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Restra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ; dan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023
(Target berdasarkan renstra perangkat daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Restra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7+9)	11 = (10/4)
1	5	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP SATPOL PP	90	62	100%	103,46	103,46 %	85	250,46	278,29%

1	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dukumen capain kinerja yang disusun**	16	2	100%	9	9%	16	27	168,75%
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	0	8	4	0,5%	6	10	166,67%
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Lap Hasil Koordinasi	1	0	1	1	1%	1	2	200,00%
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Lap Hasil Koordinasi	1	1	1	1	1%	1	3	300,00%
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA dan SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Lap Hasil Koordinasi	1	1	1	1	1%	1	3	300,00%
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA dan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Lap hasil koordinasi	1	0	2	2	1%	1	3	300,00%
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi	1	0	1	0	0	1	1	100,00%

1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	0	2	0	0	2	2	100,00%
1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji PNS dan Laporan semester dan Achir Tahun yang diselesaikan**	73	6	100%	10	10%	73	89	121,92%
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	53	4	65	8	0,124%	53	65	122,64%
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Achir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Laporn Keuangan Akhir Tahun	2	1	2	2	1%	2	5	250,00%
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan /triwulan	18	1	6	0	0	18	19	105,56%

						/semesteran SKPD								
0 5	0 1	2. 05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	86	5	100%	0	0	86	91	105,81%
1	0 5	01	2. 05	0 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	86	5	91	0	0	86	91	105,81%
1	0 5	01	2. 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Survey Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	199	25	100%	66	66%	199	290	145,73%
p	0 5	01	2. 06	0 0 0 1	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Intalasi Lisrtik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	6	4	1	0,25%	4	11	275,00%
1	0 5	01	2. 06	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	3	3	1	0,3%	3	7	233,33%
1	0 5	01	2. 06	0 0 0 5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket bareng cetakan dan Pengandaan yang disediakan	3	5	3	1	0,3%	3	9	300,00%

1	05	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5	4	6	1	0,18%	5	10	200,00%
1	05	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	3	36	9	0,25%	36	48	133,33%
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi	108	3	108	52	0,50%	108	163	150,93%
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	1	7	1	0,145%	7	9	128,57%
1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	5	0	100%	1	1%	5	6	120,00%
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kndaraan Dinas Jabatan	1	0	4	0	0	1	1	100,00%

1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	0	1	0	0	1	1	100,00%
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	2	0	1	0	0	2	2	100,00%
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	0	10	1	0,1%	1	2	200,00%
1	05	01	2.08		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Keperluan kantor yang terpenuhi**	7	15	100%	2,27	2,27%	7	24,27	346,71%
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan bahan logistic	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	8	2	0,8	0,4%	1	9,8	980,00%
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air listrik yang disediakan	3	3	3	0,75	0,25%	3	6,75	225,00%
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2	4	2	1	0,5%	2	7	350,00%

1	0 5	01	2. 09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah yang dipelihara**	45	9	100%	15,19	15,19%	45	69,19	153,76%
1	0 5	01	2. 09	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	3	1	0	0	1	4	400,00%
1	0 5	01	2. 09	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	36	3	36	10,8	0,3%	36	49,8	138,33%
1	0 5	01	**2. 09**	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung /kantor yang terawat	2	3	2	1,0	0,5%	2	6	300,00%
1	0 5	02	2. 09	0 0 0 7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah asset tetap yang dipelihara (gedung Pintu,dandle dll)	5	0	5	3	0,6%	5	8	160,00%
1	0 5	02			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN**	**Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan**	95%	47	100%	93,91	93,91%	85%	141,76	14922,11 %

					DAN KETERTIBAN UMUM	**Ketertiban Umum yang diselesaikan**							
1	05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**Jumlah Penangan Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan**	10.847	24	100%	71,38	71,38%	10.847	10942,4	100,88%
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Ganggunan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalanan	56	3	55	14,85	0,27%	56	73,85	131,88%
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Perdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan	118	4	178	39	0,22%	118	161	136,44%

1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	1	12	9	0,75%	3	13	433,33%
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	9	26	0	0	20	29	145,00%
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpo PP dan Satlinmas yang ditingkatkan Kapasitasya	90	3	122	0	0	90	93	103,33%
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Pencegahan Kejahatan	10.545	4	3	1	0,3%	10.545	10550	100,05%

1	05	02	2.01	0018	Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	3	0	8	0	0	3	3	100,00%
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	11	0	9	8,19	0,91%	11	19,19	174,45%
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakkan Perda dan Perkada yang terlayani	2	0	2	0	0	2	2	100,00%
1	05	02	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Pelanggaran Perda yang diawasi dan ditangani**	76	17	100%	22,53	22,53%	76	115,53	152,01%
1	05	02	2.02	0010	Sosialiasasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat /Kelompok	5	8	2	6	3%	5	19	380,00%

						Masyarakat Pelaku Usaha								
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	46	5	47	11,8	0,26%	46	62,8	136,52%
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	25	4	9	4,7	0,53%	25	33,7	134,80%
1	5	02	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pegawai yang mengikuti**	4	6	100%	0	0	4	10	250,00%

1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4	6	9	0	0	4	10	250,00%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.1.2

Katagori Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Resrtra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisa factor penyebab tidak tecapainnya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Restra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana table berikut

Tabel 2.1.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

(diisi sesuai capaian kinerja tahun 2023)

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Pridikat**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	103,46 %	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Restra PD	Kebijakan yang diambil
Ada beberapa Sub Kegiatan yang anggaran nya belum dapat diserap secara maksimal dikarenakan ada perubahan pada aliran kas	Akan dilaksanakan sesuai dengan target	Pelaksanaan kegiatan TB I

	waktu yang telah ditentukan	
Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	93,91 %	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Restra PD	Kebijakan yang diambil
Kegiatan yang dilaksanakan pada TB I untuk bidang Operasional dan Linmas telah dilaksanakan sesuai target Namun pada bidang Pengakan Perundang Undangan yang terkait dengan DBHC HT baru masuk pada DPA SKPD bulan Maret sehingga untuk Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum dapat tersealisasi sesuai dengan target kegiatan.		Melaksanakan kegiatan yang sudah teranggarkan sesuai dengan Waktu dan target yang telah ditetapkan

Sumber :Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023Triwulan IV

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capain kinerja pelayanan Perangkat daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal, serta Indikator Kinerja (IKU) sesuai dengan Bisnis Utama (core Bussiness) dan indicator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA s/d TB II 2024

diganti Tahun 2023 Triwulan IV TAHUN 2023

No	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2023	Target Per TB				Realisasi sampai dengan TW IV 2023	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Stabilitas Kondisi Sosial Tentram Tertib dan Religius	- Persentase Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	20	35	30	15	100 %	100 %
		Persentase Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	100 %	25	25	25	25	96 %	96 %

Tibun TB I 20 21 24 = 65

Perda I 13 27 35 = 75

Tabel 2.2.1

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2024- 2026					Realisasi Capaian				Proyeksi	Capaian Analisis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024 s/d semester 1	Thn 2025	Thn 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	100 %		NA	NA	85 %	95 %	100%	-	-	49 %			
2	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	100 %		NA	NA	85 %	95 %	100%	-	-	47 %			

Sumber Laporan Pelaksanaan SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaaan tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat . Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk adalah ***"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan dan penegakan Perda "*** . Dalam mewujudkan kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tenteram, ada beberapa ***isu strategis yang harus dijalankan dalam mencapai tujuan Satpol PP***

1. Penanganan gangguan terkait dengan ijin dan operasional Perusahaan;
2. Penguatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada
3. Optimalisasi Peran Linmas dalam mendukung terwujudnya Trantibum yang berbasis Masyarakat

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (capaian Tahun 2023 TW IV)

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Garda terdepan Penegak Perda dan untuk mendukung kegiatan tersebut ada 2 Program yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk , dua program tersebut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari Kedua Program tersebut diatas dapat diuraikan Kegiatan dan Sub Kegiatan serta hasil Penyerapan anggaran sampai dengan TB IV 2023 sebagai berkut :

1. **PROGRAM**

   PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

   - **Kegiatan**

     Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   - **Sub Kegiatan**

   a. Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.570.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 4.410.000,- atau sekitar 79,17 %
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD sub Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp 7.389.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.778.000,- atau sekitar 78.20 %
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.157.500,- dan teralisasi sebesar Rp. 4.105.000,- atau sekitar 66,67 %
   d. Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.895.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.946.000,- atau sekitar 67,22 %
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.710.500,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.910.000, atau siktar 70,47 %

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisarbrealisasi Kinerja SKPD sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 6.894.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.307.000,- atau sekitar 91,49 %

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.600.500 dan teralisasi sebesar Rp. 4.431.000,- atau sekitar 78,42 %

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- **Sub Kegiatan**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjngan ASN Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.113.792.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.843.738.803,- atau sekitar 95,58 %

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.856.000,- atau sikitar 87,18 %

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.421.000,- dan teralisasi Rp. 4.431.000,- atau sekitar 35 %

- **Kegiatan**

  Administrasi Umum Perangkat Daerah
- **Sub Kegiatan**

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.041.524,- danteralisasi sebesar Rp. 6.820.600,- atau sekitar 84,82 %

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.833.850,- dan teralisasi sebesar Rp. 79.654.060,- atau sekitar 99,02 %

c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.365.250,- dan teralisasi sebesar Rp.8.126.000,- atau sekitar 86,77 %

d. Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan sub kegiatan ini Rp. 5.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.136.000,- atau sekitar Rp.86,77 %

e. Fasilitasi kunjungan tamu sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.875.000,- dan terealisasi Rp. 8.604.500,- atau sekitar 48.14 %

f. Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 178.094.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 160.246.000,- atau sekitar 89,98 %

g. Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.010.000 dan teralisasi Rp. 6.700.500,- atau sekitar Rp. 95,58 %

- **Kegiatan**

Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Sub Kegiatan**

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainya sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 83.371.690,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.121.000,- atau sekitar 99,70 %

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- **Sub Kegiatan**

a. Penyediaan jasa surat menyurat sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.690.500,- atau sekitar 99,65 %

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 112.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.532.664,- atau sekitar 61,19 %

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 54.924.000,- dan teralisasi Rp. 50.044.320,- atau sekitar 85,63 %

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- **Sub Kegiatan**

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 87.528.200,- dan terealiasi sebesar Rp. 76.169.055,- atau sekitar 87,02 %

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 378.335.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 314.685.333,- atau sekitar 83.18 %

c. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.627.875,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.558.500,- atau sekitar 95,18 %

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Kegiatan**

  Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten

- **Sub Kegiatan**

a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 727.699.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 696.525.380,- atau sekitar 95,72 %

b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp .43.164.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.638.550,- atau sekitar 98,78 %

c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.455.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.985.000,- atau sekitar 78,43 %

d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 168.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp 151.331.500,- atau sekitar 89.58 %

e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia Rp. 248.338.750,- dan terealisasi 240.523.089,- atau sekitar 96.85 %

f. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.424.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.352.795.520,- atau sekitar 94.94 %

g. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.134.000,- dan terealisasi Rp. 1.952.000,- atau sekitar 91.47 %

h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sub kegiatan ini diangarkan sebesar Rp. 2.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau sekitar 0 %

- **Kegiatan**

  Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- **Sub Kegiatan**

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.378.978.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.248.211.300,- atau sekitar 90.52 %

b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturandaerah dan Peraturan Bupati/Walikota sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 55.692.500,- dan teraliasi Rp. 48.450.000,- atau sekitar 87 %.

c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walik Kota sub kegitan ini dianggarkan sebesar Rp. 812.156.500,- dan terealisasi sebesar Rp.703.655.396,- atau sekitar 86.64 %

- **Kegiatan**

  Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan

a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau sekitar 91,46 %

Sumber data SPJ FUNGSIONAL Bulan Desember 2023

2.3.2 Permasalahan dan hambatan

Permasalah adalah kesenjangan antara kinerja yang di capai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan dengan karakteristik bersifat penting,mendasar,mendesak, untuk pencapaian tujuan penyelnggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya gangguan trantibum Akibat Proses Perizinan dan aktifitas Perusahaan;
2. Adanya Protes Masyarakat Akibat dampak Polusi Perusahaan;
3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada ;
4. Kurangnya Kapasitas PPNS;
5. Peran Linmas Tingkat Desa/Kelurahan yang belum Optimal ; sedangkan beberapa hambatan yang dilaksanakan
6. Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kab. Nganjuk dengan Anggota Satpol PP belum sebanding
7. Besarnya aktivitas dan daya tarik investasi memunculkan Permasalahan bidang hokum social dan ekonomi
8. Bertambahnya ruang public di Kabupaten Nganjuk yang berpotensi menganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari beberapa Permasalah tersebut diatas sudah diupayakan untuk mencari Solusi dan Jalan keluar dengan kegiatan serta pendanaan yang diampu di Satpol PP sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 ,Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verivikasi , Validasi dan Intentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah

Visi pmbangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005- 2025 adalah " Nganjuk Yang Maju, Adil dan Sejahtera " , dan dijabarkan dalam Misi sebgai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahtraan masyarakat dan pemertaan pembangunan yang berkeadilan.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hokum yang didukung oleh profesionalisme aparatur
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib dan damai
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari

Sedangkan dalam Pelaksanaan Praturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standard Pelayanan minimal untuk Standar Teknis mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Tabel SPM berikut ini :

STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2023

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal							Keterangan
			Indikator	Komponen		Rumus		Tolak ukur capaian	Target	
1	2	3	4	5		6		7	8	9
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Pemenuhan Standar Operasional berdasarkan peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan	SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada		Ada atau Tidak SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada		Ada	Ada	
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Pemenuhan Kendaraan Operasional	Kendaraan Dalmas	A	Jumlah Kendaraan Dalmas yang ada	0	X 100%	Tersediany a Kendaraan Dalmas	%	- Satu regu berjumlah 10 anggota dan 1 komandan regu
				B	Jumlah Regu Dalmas	5				
			Kendaraan patroli	A	Jumlah kendaraan patrol yang ada	4	X 100%	Tersediany a	80 %	- Kendaraan Jenis offroad/

				B	Jumlah regu	5		Kendaraan Patroli		jeep,doublecabin, minibus - Roda dua
			Kendaraan angkut		Pengadaan kendaraan angkut dapat dilakukan dengan melihat banyaknya jumlah penertiban / pelanggaran peraturan daerah/ peraturan Kepala Daerah.	Ada atau Tidak		Tersediany a Kendaraan Angkut	Belum	- Kendaraan jenis truk - Dipergunakan untuk mengangkut pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), Pekerja Seks Komersial (PSK), serta Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Hasil-Hasil Penertiban lainnya
		Pemenuhan Perlengkapan operasional	Perlengkapan perorangan	A	Jumlah Perlengkapan perorangan yang ada	0	X 100%	Tersediany a Perlengkap an	0%	(Perlengkapan perorangan per paket terdiri) a. tonfa dan holster

				B	Jumlah Anggota Pol PP yang tergabung dalam regu	56		perorangan		tonfa; b. borgol; c. tameng; d. senter; e ferplas; f. tas atau ransel; g.*sleeping bag;* h. jaket; i. rompi/*body protector;* j. masker.
			Perlengkapan beregu		Jumlah Perlengkapan Beregu yang dimiliki	Ada atau Tidak		Tersedianya Perlengkapan Beregu		Perlengkapan Beregu terdiri dari Perlengkapan Perorangan di tambah dengan matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi

			Perlengkapan Patroli		Perlengkapan Patroli yang dimiliki		Ada atau Tidak		Tersedianya Perlengkapan Patroli	Belum	Perlengkapan patroli terdiri dari Kendaraan patroli, Perlengkapan Perorangan, ditambah Peralatan Komunikasi.
			Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada		Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada yang dimiliki		Ada atau Tidak		Tersediany a Perlengkap an Penegakan Perda dan Perkada	Belum	Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan Perda yustisial.
3	Standar Peningkatan Kapasitas	Pemenuhan Standar Kualitas Anggota Satpol	Persentase Pejabat Pol PP yang telah memiliki Sertifikat	A	Jumlah Pejabat Pol PP yang memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar	43	x100%	76,7 %	76,7 %	

	Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan masyarakat	PP	Pendidikan Dasar	B	Jumlah Pejabat Pol PP	56				
			Persentase Pejabat Fungsional Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	A	Jumlah Pejabat Pol PP yang memiliki Sertifikat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0	x100%	0 %	0 %	
				B	Jumlah Pejabat Pol PP	56				
			Persentase **Pejabat PPNS Pol PP** yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	A	Jumlah Pejabat PPNS Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0	x100%	0 %	0 %	
				B	Jumlah Pejabat PPNS Pol PP	0				
4	**Standar Pelayanan**	**Pelayanan Kerugian**	**Persentase Jumlah masyarakat yang**	**A**	**Jumlah masyarakat**	**0**	**x100%**	**0 %**	**0 %**	- Biaya 2,5 % dari operasional

	Masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	**Material**	**memperoleh layanan kerugian materil akibat dari dari penegakan hukum Perda dan Perkada.**		**memperoleh layanan kerugian materil**					penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan - Berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada - tindakan pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik
				B	**Jumlah keseluruhan masyarakat yang seharusnya memperoleh layanan kerugian materil**	**0**				
		Pelayanan Pengobatan	**Persentase Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pengobatan yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada**	**A**	**Jumlah masyarakat memperoleh layanan pengobatan**	**0**	**x100%**	**0 %**	**0 %**	
				B	**Jumlah keseluruhan masyarakat yang seharusnya**	**0**				

					memperoleh layanan pengobatan					sedang dan/atau berat

Dengan dicanangkannya program tujuan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah, secara keseluruhan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Mengaakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi , dan mendorong pertanian yang berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang disegala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setip orang
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air sertasanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang
7. Menjamin akses energy yang terjangkau, terjarmin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun insfrastuktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan,aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera,lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pemabangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbaharui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan

yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi pengangguran, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan,menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif,akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (mens of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi saat ini	Standart yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
Meningkatnya Penegakan Perda	Sedang	SPM	Internal (Kewenangan OPD)	Ekternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Penegakan Perda	Sedang	SPM	1. Terbatasnya PPNS Satpol PP 2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait 3. Sebagian besar Personil Satpol PP belum mengikuti diklat dasar Satpol PP sesuai Permendagri No	1. Kurangnya Sosialisasi Perda dan Perkada 2. Pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada banyaknya	Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan Masyarakat Badan Hukum dan instansi

			38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Pelanggar Perda	

2.3 .5 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindak lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pada dasarnya hakekat Otonomi Daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah mempunyai Fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-funsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Adapun Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Penyusunan Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah danperaturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hokum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
6. Pengelolaan Administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas ;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian memunculkan konsekkuensi terbentuknya organisasi Perangkat Daerah baru menyesuaikan atas apa yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka untuk UPT Pemadam Kebakaran sejak di berlakukanya Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 berdiri menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .

2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah sebagaimana table berikut dibawah ini :

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
Kabupaten Nganjuk

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17.110.355.410					**17.110.355.410**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Satpol PP	Nilai SAKIP SATPOL PP	**90**	**10.910.556.160**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Satpol PP	Nilai SAKIP SATPOL PP	**90**	**10.910.556.160**	
	Perencanaan, Penganggara, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu	**16 dok**	**32.406.000**	**Perencanaan, Penganggara, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Satpol PP	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu	**16 dok** 30	**32.406.000**	

	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	14.628.000	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	14.628.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.968.000	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	4.968.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.670. 000	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.670.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan	1 lap	5.840.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar	1 lap	5.840.000	

	SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD			SKPD		realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	3.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	3.300.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	**Jumlah dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan yang disusun tepat waktu**	**73 dokumen**	**7.088.222.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Satpol PP	**Jumlah dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan yang disusun tepat waktu**	**73 dokumen**	**7.088.222.000**	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang	7.078.294.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang	7.078.294.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.088.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.088.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	18 Laporan	4.840.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan	18 Laporan	4.840.000	

			nan SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteranan SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	**86**	**287.487.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Satpol PP	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	**86**	**287.487.400**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	287.487.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	287.487.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Kebutuhan Admistrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	**199**	**943.692.910**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Satpol PP	Jumlah Kebutuhan Admistrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	**199**	**943.692.910**	

	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.182.660	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.182.660	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	215.463.850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	215.463.850	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	11.999.400	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	11.999.400	
	Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dok	4.800.000	Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dok	4.800.000	

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	28.800.500	Fasilitas Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	28.800.500	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	663.447.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	663.447.500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dokumen	11.999.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dokumen	11.999.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang akan diadakan	**5 jenis**	**1.396.003.550**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang akan diadakan	**5 jenis**	**1.396.003.550**	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1.000.000.000	
	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	60.003.550	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	60.003.550	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	336.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	336.000.000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu	**7 jasa**	**482.860.000**	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Satpol PP	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu	**7 jasa**	**482.860.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan bahan logistic	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan bahan logistic	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	4.500.000	

	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lapa	232.000.000	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lapa	232.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	246.360.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	246.360.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik	**45 jenis**	**679.884.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Satpol PP	Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik	**45 jenis**	**679.884.300**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 kendaraan	123.822.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 kendaraan	123.822.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 kendaraan	460.062.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 kendaraan	460.062.100	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah paralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara	2 peralatan	96.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah paralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara	2 peralatan	96.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Prosentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tertangani	**95%**	**6.199.799.250**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Satpol PP	Prosentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tertangani	**95%**	**6.199.799.250**	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	**10.847**	**5.287.249.200**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	**10.847**	**5.287.249.200**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,	3 Dokumen	40.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelengga	3 Dokumen	40.000.000	

	Kabupaten/Kota		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota			Kabupaten		raan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	199.999.800	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	199.999.800	

	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	10.545 Dokumen	2.299.999.750	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	10.545 Dokumen	2.299.999.750	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	11 Dokumen	7.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	11 Dokumen	7.000.000	

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10 0rang	69.980.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10 orang	69.980.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui UJI kompetensi untuk usulan perpindahanjy Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaiakn Jenjang Jabatan	Satpol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	3 Orang	15.280.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui UJI kompetensi untuk usulan perpindaha Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaiakn Jenjang Jabatan	Satpol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	3 Orang	15.280.000	

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	400 Orang	1.499.989.850	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	400 Orang	1.499.989.850	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingktkan Kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100 Orang	140.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingktkan Kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100 Orang	140.000.000	

	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	56 Laporan	740.170.800	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Satpol PP	Jumlah LaporanGangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	56 Laporan	740.170.800	

	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	118 Laporan	150.000.000	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	118 Laporan	150.000.000	
	Penyediaan Layanan Dasar Dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	5.000.000	Penyediaan Layanan Dasar Dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	5.000.000	

	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	10 Unit	119.829.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	10 Unit	119.829.000	
	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani	**76 lap**	**580.255.300**	**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Satpol PP	Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani	**76 lap**	**580.255.300**	
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggara Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 Lap	9.400.000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggara Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 Lap	9.400.0000	

	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 Lap	24.900.000	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 Lap	24.900.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	2 Lap	14.599.700	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	2 Lap	14.599.700	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran	2 Lap	5.126.150	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran	2 Lap	5.126.150	

	Sosialiasasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	20 lap	390.519.800	Sosialiasasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	20 lap	390.519.800	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	25 Laporan	71.319.700	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	25 Laporan	71.319.700	

	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	46 Laporan	64.389.950	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	46 Laporan	64.389.950	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	**4 lap**	**332.294.750**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	**4 lap**	**332.294.750**	

	Pembentukan Sekretariat PPNS	Satpol PP	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	4 dok	137.249.950	Pembentukan Sekretariat PPNS	Satpol PP	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	4 dok	137.249.950	
	Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 dok	18.864.900	Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 dok	18.864.900	
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Orang	141.280.000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Orang	141.280.000	

	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Satpol PP	Jumlah hasil Laporan Kinerja Sekretariat PPNS	2 Lap	4.900.000	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Satpol PP	Jumlah hasil Laporan Kinerja Sekretariat PPNS	2 Lap	4.900.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	29.999.900	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	29.999.900	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah, penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.5.1

Usulan program dan kegiatan dari para emangku kepentingan

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema "**Akselesari Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan** " dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demikrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) ;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi , Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastuktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan,mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah raga, Kesetaaan gender,serta penguatan peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milinial dan Generasi Z , dan Penyadang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam Negeri ;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelasaran Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat beragama untuk Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Ketentramn dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda adapun sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya penangan gangguan Trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Penegakan Perda			95%
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	95 %
		Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	95 %

Sumber Restra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Prgram dan kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas masyarakat Kabupaten Nganjuk yang taat dan patuh pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Langsung yang anggaranya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan wajib dan Pilihan (Program) dengan ruang lingkup kegiatanya. Selanjutnya kebijkan Operasional dalam menunjang perwujudan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja direalisasikan dalam Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun rencana)			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6
				17.110.355.410	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP SATPOL PP	Satpol PP	**90,00**	**10.910.556.160**	APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Satpol PP	**16 dok**	**32.406.000**	APBD

Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	6 dok	14.628.000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	1 Dukumen	4.968.000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Satpol PP	1 Dukumen	3.670. 000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD	Satpol PP	1 lap	5.840.000	APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	3 lap	3.300.000	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordin**	**Satpol PP**	**73 dok**	**7.088.222.000**	**APBD**

	penyusunan laporan akh tahun SKPD, Jumlah lapor keuangan bulanan/triwul an/semest SKPD dan laporan koordi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwul an/semest SKPD				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	53 Orang	7.078.294.000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	2 Laporan	5.088.000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satpol PP	18 Laporan	4.840.000	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Satpol PP**	**86 paket**	**287.487.400**	**APBD**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Satpol PP	86 paket	287.487.400	APBD

Kelengkapanya	Kelengkapan				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia**	**Satpol PP**	**199**	**943.692.910**	**APBD**
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	4 paket	7.182.660	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP	3 paket	215.463.850	APBD
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Satpol PP	3 paket	11.999.400	APBD
Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Satpol PP	5 dokumen	4.800.000	APBD
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	36 lap	28.800.500	APBD
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	108 Lap	663.447.500	APBD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satpol PP	7 dok	11.999.000	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dan operasional yang disediakan, jumlah mebel yang dibeli dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan**	**Satpol PP**	**5 jenis**	**1.396.003.550**	**APBD**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Satpol PP	1 unit	1.000.000.000	APBD
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP	2 paket	60.003.550	APBD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Satpol PP	1 unit	336.000.000	APBD
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan**	**Satpol PP**	**7 lap**	**482.880.000**	**APBD**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan bahan logistic	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Satpol PP	1 lap	4.500.000	APBD
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP	3 lap	232.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP	2 laporan	246.360.000	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya, peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang terawat serta jumlah aset tetap yang terpelihara**	**Satpol PP**	**45 kendaraan**	**679.884.300**	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Satpol PP	1 kendaraan	123.822.200	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Satpol PP	36 kendaraan	460.062.100	APBD

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara	Satpol PP	2peral atan	96.000.000	APBD
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan Jumlah Pelanggaran K3 dan Perda yang ditangani dan terselesaikan**	**Satpol PP**	**95 %**	**6.199.799.250**	**APBD**
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan**	Satpol PP	**10.847 lap**	**5.287.249.200**	**APBD**
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenterama, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	3 dokumen	40.000.000	APBD

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	20 dok	199.999.800	APBD
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	10.545 dok	2.299.999.750	APBD
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP	11 dok	7.000.000	APBD
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Satpol PP	10 Orang	69.980.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Jabatan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi	Satpol PP	3 Orang	15.280.000	

melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional POL PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP	400 Orang	1.499.989.850	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis SatpolPP dan Satlinmas	Satpol PP	100 Orang	140.000.000	
Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah lap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	56 lap	740.170.800	APBD
Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	Satpol PP	118 lap	150.000.000	APBD

Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		2 lap	5.000.000	APBD
Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Satpol PP	3 sapras	119.829.000	APBD
Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani**	**Satpol PP**	**76 lap**	**580.255.300**	**APBD**
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	8Laporan	9.400.000	APBD
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	24 Lap	24.900.000	APBD

Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	Satpol PP	2 Lap	14.599.700	APBD
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda	Satpol PP	2 Laporan	5.126.150	APBD
Sosialiasasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Satpol PP	5 lap	390.519.800	APBD
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Satpol PP	25 lap	71.319.700	APBD
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	46 lap	64.389.950	APBD

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat** PPNS	Satpol PP	**4 lap**	**332.294.750**	**APBD**
Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Satpol PP	4 dok	137.249.950	APDB
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	3 dok	18.864.900	APBD
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang menngikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	4 orang	141.280.000	APBD
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Kinerja Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Satpol PP	2 Lap	4.900.000	APBD
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Penegak Perda	Satpol PP	4 lap	29.999.900	APBD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya penanganan gangguan trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Penegakan Perda	95 %
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	95 %
Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	95 %

3.2.3 Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/SDG's menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDG's di tingkat nasional telah sejalan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program ,kegiatan dan indicator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

3.3 Program dan Kegiatan

Dari beberapa factor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat daerah sebagaimana table berikut :

Tabel 3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana
1					2	3	4	5	6	7
									17.110.355.410	
5	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP SATPOL PP	Satpol PP	**90,00**	**10.910.556.160**	APBD
5	**01**	**2,01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Satpol PP	**16 dok**	**32.406.000**	APBD
5	01	2,01	0001		Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	6 dok	14.628.000	APBD
5	01	2,01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dukumen	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan	Satpol PP	1 Dukumen	4.968.000	APBD

					RKA SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
5	01	2,01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Satpol PP	1 Dukumen	3.670. 000	APBD
5	01	2,01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD	Satpol PP	1 lap	5.840.000	APBD
5	01	2,01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	3 lap	3.300.000	APBD

5	**01**	**2,02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordin penyusunan laporan akh tahun SKPD, Jumlah lapor keuangan bulanan/triwulan/semest SKPD dan laporan koordi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semest SKPD**	**Satpol PP**	**73 dok**	**7.088.222.000**	**APBD**
5	01	2,02	001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	53 Orang	7.078.294.000	APBD
5	01	2,02	005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Satpol PP	2 Laporan	5.088.000	APBD

					Tahun	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
5	01	2,02	007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Satpol PP	18 Laporan	4.840.000	APBD
5	**01**	**2,05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Satpol PP**	**86 paket**	**287.487.400**	**APBD**
5	01	2,05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP	86 paket	287.487.400	APBD
5	**01**	**2,06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah paket komponen instalasi listrik/pene**	**Satpol PP**	**199**	**943.692.910**	**APBD**

						rangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia				
5	**01**	**2,06**	0001		Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	4 paket	7.182.660	APBD
5	01	2,06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP	3 paket	215.463.850	APBD
5	01	2,06	0005		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Satpol PP	3 paket	11.999.400	APBD
5	1	2,06	0006		Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Satpol PP	5 dokumen	4.800.000	APBD

						Disediakan				
5	1	2,06	0007		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	36 lap	28.800.500	APBD
5	1	2,06	0009		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	108 Lap	663.447.500	APBD
5	1	2,06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satpol PP	7 dok	11.999.000	APBD
5	**01**	**2,07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dan operasional yang disediakan, jumlah mebel yang dibeli dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan**	**Satpol PP**	**5 jenis**	**1.396.003.550**	**APBD**
5	01	2,07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Satpol PP	1 unit	1.000.000.000	APBD

					atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan				
5	01	2,07	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP	2 paket	60.003.550	APBD
5	01	2,07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Satpol PP	1 unit	336.000.000	APBD
5	**01**	**2,08**			**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan**	**Satpol PP**	**7 lap**	**482.860.000**	**APBD**

5	01	2,08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan bahan logistic	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	1 lap	4.500.000	APBD
5	01	2,08	0002		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP	3 lap	232.000.000	APBD
5	01	2,08	0003		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP	2 laporan	246.360.000	APBD
5	**01**	**2,09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya, peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang terawat serta jumlah aset tetap**	**Satpol PP**	**45 kendaraan**	**679.884.300**	APBD

						yang terpelihara				
5	01	2,09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Satpol PP	1 kendaraan	123.822.200	APBD
5	1	2,09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Satpol PP	36 kendaraan	460.062.100	APBD
5	01	2,09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara	Satpol PP	2peralatan	96.000.000	APBD
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan**	**Satpol PP**	**95 %**	**6.199.799.250**	**APBD**

						Jumlah Pelanggaran K3 dan Perda yang ditangani dan terselesaikan				
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah lap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan**	Satpol PP	**10.847 lap**	**5.287.249.200**	**APBD**
05	2	2,01	0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	3 dokumen	40.000.000	APBD

						Tingkat Kabupaten /Kota				
05	02	2,01	0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	20 dok	199.999.800	APBD
05	2	2,01	0006		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	10.545 dok	2.299.999.750	APBD
05	02	2,01	0008		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhir	Satpol PP	11 dok	7.000.000	APBD

						kan				
05	02	2,01	0010		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP , dan Uji Kompetensi bagi pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikutiPendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Satpol PP	10 orang	69.980.000	APBD
05	02	2,01	0012		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatanke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Satpol PP	3 Orang	15.280.000	APBD
05	02	2,01	0013		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasny	Satpol PP	400 orang	1.499.989.850	APBD

						a				
05	02	2,01	0014		Peninkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP	100 orang	140.000.000	APBD
05	02	2,01	0015		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah lap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	56 lap	740.170.800	APBD
05	02	2,01	0016		Penindakan atas gangguan ketentraman dan	Jumlah laporan Gangguan Ketenteram	Satpol PP	118 lap	150.000.000	APBD

					ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	an dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				
05	2	2,01	0017		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		2 lap	5.000.000	APBD
05	02	2,01	0018		Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Satpol PP	3 sapras	119.829.000	APBD
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat**	**Satpol PP**	**76 lap**	**580.255.300**	**APBD**

05	02	2,02	0004		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	8 laporan	9.400.000	APBD
05	02	2,02	0007		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	24 lap	24.900.000	APBD
05	02	2,02	0008		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	Satpol PP	2 laporan	14.599.700	APBD
05	02	2,02	0009		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Satpol PP	2 laporan	5.126.150	APBD
05	02	2,02	0010		Sosialiasasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada	Satpol PP	5 lap	390.519.800	APBD

						Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/				
05	02	2,02	0011		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Satpol PP	25 lap	71.319.700	APBD
5	02	2,02	0012		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	46 lap	64.389.950	APBD
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat** PPNS	Satpol PP	**4 lap**	**332.294.750**	**APBD**
05	02	2,	00		Pembentukan	Surat Keputusan	Satpol PP	4 dokumen	137.249.950	APBD

		0 3	0 2		Sekretariat PPNS	Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				
0 5	0 2	2 , 0 3	0 0 0 3		Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	3 dokumen	18.864.900	APBD
0 5	0 2	2 , 0 3	0 0 0 4		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikutiDiklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	4 Orang	141.280.000	APBD
0 5	0 2	2 , 0 3	0 0 0 5		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Satpol PP	2 Laporan	4.900.000	APBD
0 5	0 2	2 , 0 3	0 0 0 6		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Penegak Perda	Satpol PP	4 laporan	29.999.900	APBD

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. NGANJUK

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						17.110.355.410,00							18.461.987.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.110.355.410,00							18.461.987.200,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						17.110.355.410,00							18.461.987.200,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja*	90 Nilai			90 Nilai	10.910.556.160,00						90 Nilai	13.785.838.200,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu*	16 Dokumen			16 Dokumen	32.406.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	16 Dokumen	37.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	14.628.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	6 Dokumen	11.520.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	4.968.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	1 Dokumen	4.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.670.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	1 Dokumen	4.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	5.840.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	1 Laporan	11.520.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	3.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	2 Laporan	5.760.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan yang disusun secara tepat waktu*	73 Dokumen			73 dokumen	7.088.222.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	73 Dokumen	10.034.955.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan			53 Orang/bulan	7.078.294.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	53 Orang/bulan	10.024.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	5.088.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Laporan	4.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	4.840.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	18 Laporan	5.535.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas*	86 paket			86 paket	287.487.400,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	86 paket	152.323.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket			86 Paket	287.487.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	86 Paket	152.323.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia*	199 paket			199 Paket/Dokumen/Laporan	943.692.910,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	199 paket	806.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGETRENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	7.182.660,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	4 Paket	8.640.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	215.463.850,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	3 Paket	252.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	11.999.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	3 Paket	14.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			5 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	5 Dokumen	14.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan			36 Laporan	28.800.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	36 Laporan	34.560.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan			108 Laporan	663.447.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	108 Laporan	468.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen			7 Dokumen	11.999.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	7 Dokumen	14.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	5 Jenis			5 jenis	1.396.003.550,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	5 Jenis	1.627.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	1.152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	60.003.550,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Unit	72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	336.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	403.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu*	7 laporan			7 laporan	482.860.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	7 laporan	249.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	4.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	232.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	3 Laporan	158.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	246.360.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Laporan	86.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik*	45 Unit			45 jenis	679.884.300,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	45 Unit	878.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	123.822.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	187.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit			36 Unit	460.062.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	36 Unit	576.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			2 Unit	96.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Unit	115.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani***	95 %			95 %	6.199.799.250,00						95 %	4.676.149.000,00	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani*	10.847 kasus			10847 kasus	5.287.249.200,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	10.847 kasus	4.287.549.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen			3 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	3 Dokumen	64.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen			20 Dokumen	199.999.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	20 Dokumen	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	10.545 Dokumen			10545 Dokumen	2.299.999.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	10.545 Dokumen	1.584.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	11 Dokumen			11 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	11 Dokumen	10.080.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10 Orang			10 Orang	69.980.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	10 Orang	105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan														
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	3 Orang			3 Orang	15.280.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	3 Orang	22.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	200 Orang			400 Orang	1.499.989.850,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	200 Orang	755.169.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	60 Orang			100 Orang	140.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	60 Orang	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	56 laporan			56 laporan	740.170.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	56 laporan	800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	118 Laporan			118 Laporan	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	118 Laporan	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan			2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	5 Laporan	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit			3 Unit	119.829.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	1 Unit	76.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani*	76 laporan			76 laporan	580.255.300,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	76 laporan	309.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 laporan			8 laporan	9.400.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	5 laporan	48.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan			24 Laporan	24.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	4 Laporan	39.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	2 laporan			2 laporan	14.599.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	2 laporan	28.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	5 Dokuman			2 Dokumen	5.126.150,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	5 Dokuman	28.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Laporan			5 Laporan	390.519.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	5 Laporan	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	25 Laporan			25 Laporan	71.319.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	25 Laporan	32.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46 Laporan			46 Laporan	64.389.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	46 Laporan	32.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*	4 laporan			4 laporan	332.294.750,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	4 laporan	78.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	15 Dokumen			4 Dokumen	137.249.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	15 Dokumen	7.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	18.864.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	3 Dokumen	13.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan			4 Laporan	141.280.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	1 Laporan	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4 Laporan			2 Laporan	4.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	4 Laporan	14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan			4 Laporan	29.999.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P7 Kab : Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya	Kabupaten Nganjuk	4 Laporan	14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		JUMLAH						17.110.355.410,00							18.461.987.200,00	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuain dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuain-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlalu.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai imlementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Restra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Unit kerja pada perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
    a. Melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah , untuk memastikan bahwa program dan kegiatan,lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan rencana Kerja Perangkat Daerah ; dan
    c. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daeah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJ

ttd.

SRI HANDOK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001